



**PROSEDUR PENANGANAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
BANYUWANGI**

*(Handling Procedure Of Overpayment Return Request Of Value Added Tax At Tax  
Office Banyuwangi)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Laely Nadya Maharani  
NIM 110903101018**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**



**PROSEDUR PENANGANAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
BANYUWANGI**

*(Handling Procedure Of Overpayment Return Request Of Value Added Tax At Tax  
Office Banyuwangi)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Laely Nadya Maharani  
NIM 110903101018**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**

## **PERSEMBAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Jaka Pujiono dan Ibunda Halimahtus Sa'diyah yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
2. Kedua adikku Riska Dwi Aziza dan Viona Laelyka Aziz yang tersayang;
3. Para pengajarku sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## **MOTTO**

Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang, bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata

(Dahlan Iskan)

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : Laely Nadya Maharani

NIM : 110903101018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Prosedur Penanganan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2014

Yang menyatakan,

Laely Nadya Maharani  
NIM 110903101018

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 110903101018  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : “Prosedur Penanganan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi”

Jember, 23 Mei 2014

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP.

NIP. 197410072000121001

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

**PROSEDUR PENANGANAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
BANYUWANGI**

Oleh

**Laely Nadya Maharani**  
**NIM 110903101018**

Pembimbing

**Dosen Pembimbing : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP.**  
**NIP. 197410072000121001**

## **PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Penanganan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama banyuwangi” telah diuji dan disahkan pada :  
hari, tanggal : Jum’at, 23 Mei 2014

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A  
NIP. 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP  
NIP. 197410072000121001

Drs.Totok Supriyanto, M.Si  
NIP. 195010041977021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A  
NIP. 195207271981031003



## RINGKASAN

**Prosedur Penanganan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi;**  
Laely Nadya Maharani, 110903101018; 2014: 87 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menganut metode pengkreditan di mana Pajak Masukan dikreditkan terhadap Pajak Keluaran dalam satu periode. Pajak Masukan yang dibayar ketika membeli barang atau jasa dikreditkan terhadap Pajak Keluaran yang dipungut ketika melakukan penjualan barang atau jasa. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah PPN yang tercantum dalam bukti pungutan PPN yang disebut Faktur Pajak. Oleh karena itu, penerapan PPN di Indonesia menganut credit method atau juga invoice method. Contoh, dalam satu bulan seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) memungut PPN Rp100.000.000 (Pajak Keluaran), dan ia dipungut PPN pada bulan yang sama Rp 80.000.000 (Pajak Masukan), maka selisih Rp 20.000.000 kelebihan Pajak Keluaran merupakan PPN yang harus disetor ke kas negara. Selisih lebih Pajak Keluaran di atas Pajak Masukan ini disebut posisi Kurang Bayar (KB) dalam SPT Masa PPN bulan tersebut, namun karena sebab tertentu, dapat terjadi pula Pajak Masukan dalam satu bulan lebih besar dari Pajak Keluaran sehingga SPT Masa bulan tersebut posisinya adalah Lebih Bayar (LB). Jika posisi KB membuat PKP harus menyetor ke kas negara, maka sebaliknya posisi LB membuat Pengusaha Kena Pajak memiliki kelebihan pajak yang dapat diklaim oleh PKP tersebut.

Jika dalam satu bulan terdapat kelebihan pajak ini, maka ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh PKP. Pertama, mengkompensasikan

kelebihan tersebut ke masa pajak berikutnya. Kedua, PKP dapat meminta pengembalian pajak (restitusi).

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir Penulis dan juga untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penanganan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Praktek Kerja Nyata ini Meliputi: (1) Membantu tugas administrasi kantor (2) Mempelajari unsur-unsur materi yang terkait tentang Prosedur Penanganan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Dalam melakukan proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, diantaranya dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak terkait laporan keuangan dan aktivitas perusahaan Pengusaha Kena Pajak.

Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Penanganan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi . Dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dapat disimpulkan, bahwa Prosedur Penanganan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan menteri keuangan yang berlaku.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Penanganan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi". Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Sasongko, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam menulis Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
5. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Dadang Suwangsa, S.H, M.Si, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan praktek kerja nyata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.
7. Wahmudin Hutauruk, S.I.P, S.E, selaku Supervisor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang telah banyak memberikan informasi dan bantuan dalam proses pengambilan data di lapangan;

8. Bapak Irfan dan Mas Subhan selaku pegawai di Seksi Pemeriksaan, dan Bapak Adi selaku pegawai di seksi Pelayanan, terima kasih banyak atas bantuan informasi pengambilan data terkait Tugas Akhir Penulis.
9. Teman-teman seperjuangan, dan sahabatku Azizah, Rita, Herista, Rina, Elly, Fida, Bastian, Dhea, Anggit, Radita, Maya, Ony, Okta, Fusy, Noki, Adeck, Yoga, dan Hermawan yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
10. Bapak dan Ibu Dosen Semua, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu dosen berikan kelak dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat.
11. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
12. Almamaterku yang sangatku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat.

Jember, 23 Mei 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat (PKN)</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>2.1 Definisi Pajak</b> .....	7
2.1.1 Pungutan Selain Pajak .....	7
2.1.2 Fungsi Pajak .....	9
2.1.3 Kedudukan Hukum Pajak.....	10
2.1.4 Pembagian Hukum Pajak.....	11
2.1.5 Teori Pendukung Pemungutan Pajak.....	12
2.1.6 Jenis Pajak .....	15

2.1.7	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	17
2.1.8	Timbulnya Utang Pajak.....	22
2.1.9	Berakhirnya Utang Pajak.....	23
2.1.10	Surat Setoran Pajak.....	25
2.1.11	Surat Pemberitahuan.....	25
2.1.12	Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penguahan Pengusaha Kena Pajak.....	30
<b>2.2</b>	<b>Pajak Pertambahan Nilai.....</b>	<b>33</b>
2.2.1	Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai .....	34
2.2.2	Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	34
2.2.3	Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	35
<b>2.3</b>	<b>Istilah-istilah dalam Perpajakan.....</b>	<b>27</b>
2.3.1	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).....	37
2.3.2	Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) .....	39
2.3.3	Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).....	40
2.3.4	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).....	41
2.3.5	Kelebihan Pembayaran Pajak .....	41
2.3.6	Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu .....	43
2.3.7	Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.....	44
2.3.8	Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Orang Pribadi bukan Subjek Pajak dalam Negeri.....	45
2.3.9	Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali.....	45
2.3.10	Kelebihan Pembayaran Pajak karena Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali.....	50
<b>BAB 3.</b>	<b>GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>52</b>
<b>3.1</b>	<b>Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak</b>	

<b>Pratama Banyuwangi .....</b>	<b>52</b>
<b>3.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak</b>	
<b>Pratama Banyuwangi .....</b>	<b>53</b>
3.2.1 Penjelasan Struktur Organisasi .....	54
<b>3.3 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama</b>	
<b>Banyuwangi.....</b>	<b>63</b>
<b>3.4 Fungsi Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi ..</b>	<b>63</b>
<b>3.5 Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi .....</b>	<b>64</b>
<b>3.6 Lokasi Instansi.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>65</b>
<b>4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....</b>	<b>65</b>
<b>4.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>67</b>
4.2.1 Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	67
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	67
<b>4.3 Pelaksanaan Penanganan Permohonan Pengembalian</b>	
<b>Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai .....</b>	<b>69</b>
4.3.1 Contoh kasus Terkait dengan Pengusaha Kena Pajak Yang melakukan permohonan pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai .....	78
4.3.2 Perhitungan Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) Kepada Pengusaha Kena Pajak terkait dengan Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.....	79
4.3.3 Penghitungan Sanksi Administrasi berupa kenaikan Sebesar 100% (seratus persen) kepada Pengusaha Kena Pajak apabila dari hasil pemeriksaan ternyata Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.....	80
<b>4.4 Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Proses Permohonan</b>	
<b>Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan</b>	

<b>Nilai dan Upaya penyelesaiannya .....</b>	<b>81</b>
<b>4.5 Penilaian Terhadap Instansi dalam Pelaksanaan</b>	
<b>Pemeriksaan Pajak terkait permohonan pengembalian</b>	
<b>Kelebihan Pembayaran Pajak.....</b>	<b>83</b>
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>85</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
4.1 Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	67
4.2 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi .....	53
4.1 Prosedur Penanganan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.....	71
4.2 Prosedur Pembayaran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran-Lampiran

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
2. Surat Kesediaan Menjadi Tempat Praktek Kerja Nyata
3. Surat Tugas Dosen Supervisi
4. Surat Tugas Pembimbing
5. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
7. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata
8. Surat Pemberitahuan Masa PPN
9. Tanda Terima SPT
10. Daftar Nominatif
11. Lembar Penugasan Rutin
12. Surat Perintah Pemeriksaan
13. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
14. Kertas Kerja Pemeriksaan
15. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
16. Daftar Temuan Pemeriksaan
17. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
18. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
19. Surat Ketetapan Pajak Nihil
20. Konsep Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
21. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
22. Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
23. Surat Perintah Pencairan Dana
24. Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
25. Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

26. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-16/PMK.03/2011
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009
30. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34